

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan merupakan bagian dari pelaporan keuangan. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi (pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan) dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Pelaporan keuangan tidak hanya meliputi komponen laporan keuangan, tetapi juga meliputi laporan-laporan lain yang diperlukan (Riandani, 2017:3).

Pemerintah daerah menjadikan laporan keuangan sebagai media mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik, laporan keuangan menggambarkan kegiatan yang telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur sehingga dapat menjelaskan kinerja dan tanggung jawab pengelolaan anggaran keuangan selama satu periode tertentu (Puspita dkk, 2020:79).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya mendapat penilaian berupa opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK). Ketika BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), artinya dapat dikatakan bahwa

laporan keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Terdapat empat opini yang diberikan pemeriksa yaitu opini wajar tanpa pengecualian (WTP), opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan, opini wajar dengan pengecualian (WDP), opini tidak wajar (TW), dan pernyataan menolak memberi opini atau tidak memberi pendapat (TMP).

Menurut Binawati (2022:21) hal yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi adalah perilaku atau sikap akuntan menggunakan teknologi informasi untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan kinerjanya (Wijana, 2017:45). Menurut Jogiyanto (2018:6) pemanfaatan teknologi informasi adalah perilaku karyawan teknologi dengan tugasnya, pengukurannya, berdasarkan frekuensi penggunaan dalam diversitas aplikasi yang digunakan. Dalam pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah diharapkan dapat menyediakan informasi atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan informasi akuntansi yang akan digunakan manajer publik dalam melakukan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi secara tepat waktu, relevan, akurat dan lengkap.

Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah dan pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan daerah yang merupakan pengganti Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah. Adanya penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan

pemerintah, otomatis juga menuntut aparatur harus mengubah dalam menyelesaikan pekerjaannya dari semula manual menjadi terkomputerisasi (Binawati, 2022:21).

Berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut per Desember 2022, atas rekomendasi BPK untuk laporan hasil pemeriksaan tahun anggaran 2022, terdapat 11.020 rekomendasi senilai Rp 459.012 Miliar. Dari rekomendasi tersebut sebanyak 10.539 rekomendasi (96,09%) senilai Rp 225.770 Miliar telah ditindaklanjuti dengan semestinya. 378 rekomendasi (3,43%) belum sesuai rekomendasi, 16 rekomendasi (0,15%) belum ditindaklanjuti dan 87 rekomendasi (0,79%). Meskipun sudah mendapat opini WTP dari BPK namun Pemkab Badung masih belum mampu menyelesaikan semua rekomendasi yang diberikan pihak BPK hal itu terlihat dari laporan akhir yang diserahkan BPK bahwa masih ada rekomendasi yang tidak diselesaikan oleh pihak Kabupaten Badung terkait penggunaan sistem informasi akuntansi. Permasalahan terkait laporan keuangan sangat terkait dengan sistem pengendalian internal. Berdasarkan pernyataan Sekda Badung yang dikutip dari (bandungkab.go.id) diketahui untuk saat ini Pemkab Badung telah memiliki sebanyak 80 orang auditor internal. Namun dikatakan sebetulnya untuk keadaan ideal jumlah auditor yang dibutuhkan adalah sebanyak 90 orang dan oleh karena itu akan ditambah secara bertahap. Dari segi pemanfaatan teknologi informasi untuk saat ini hampir semua kegiatan terkait pelaporan keuangan telah menggunakan teknologi untuk pelaksanaannya.

Pemanfaatan teknologi informasi merupakan penggunaan secara optimal komputer, perangkat lunak, database, jaringan, electronic commerce, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi informasi (Purnama, 2020:406). Dalam PP No 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah disebutkan bahwa situs adalah sebuah cara untuk menampilkan profil pemerintah daerah di internet dengan tujuan antara lain menyampaikan pengumuman atau pemberitahuan, memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan menerima masukan dari masyarakat. Selain akses profil pemerintah daerah yang terkait, dalam situs resmi tersebut masyarakat dapat mengakses mengenai informasi keuangan pemerintah daerah (Edlin, 2018:6)

Pemanfaatan teknologi juga merupakan salah satu factor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Kewajiban pemanfaatan teknologi oleh pemerintah diatur dalam PP nomor 56 tahun 2005 tentang system informasi keuangan daerah. Manfaat dari penggunaan teknologi informasi ini yaitu mempercepat proses transaksi, keakuratan perhitungan, penyimpanan data dalam jumlah besar dan kemampuan multiprosecessing. Selain itu, adanya pengendalian internal berfungsi untuk mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Dengan sistem pengendalian intern akuntansi yang baik, risiko terjadinya kekeliruan dan kesalahan pencatatan atau perhitungan dapat diminimalisasi sehingga mengurangi kemungkinan pemerintah daerah mengalami kekeliruan.

Pengertian pengendalian intern dijelaskan dalam PP No. 8 Tahun 2006 dan PP No. 60 Tahun 2008. Menurut PP No. 8 Tahun 2006, sistem

pengendalian intern (SPI) adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi. Sedangkan menurut PP No. 60 Tahun 2008, sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada kegiatan dan tindakan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Sikumbang dkk, 2020:38).

Idealnya kualitas laporan keuangan adalah laporan keuangan memberikan gambaran yang akurat tentang posisi dan kinerja keuangan perusahaan. Informasi tersebut harus berguna untuk menilai masa lalu dan masa depan. Semakin tajam dan jelas gambaran yang disampaikan oleh data keuangan, dan semakin jujur laporan keuangan memberikan gambaran yang akurat tentang posisi dan kinerja keuangan perusahaan. Informasi tersebut harus berguna untuk menilai masa lalu dan masa depan. Semakin tajam dan jelas gambaran data keuangan, semakin mendekati kebenaran (Ridzal dkk, 2022:3096).

Dalam suatu instansi pengolahan data yang akurat sangat dibutuhkan, salah satunya data mengenai akuntansi dan keuangan, untuk menyajikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan. Hal ini juga berlaku dalam pemerintahan yang dituntut untuk transparan dan akuntabilitas yang mana pertanggungjawabannya di pertanyakan oleh masyarakat. Karena saat ini banyaknya kasus korupsi membuat kepercayaan masyarakat melemah

terhadap pemerintah. Sistem akuntansi pada pemerintahan harus dirancang sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu negara.

Laporan keuangan merupakan hal yang penting dalam dunia usaha maupun instansi publik. Di Indonesia laporan keuangan dikaji untuk memenuhi tuntutan terhadap lembaga publik yang semakin menguat baik pusat maupun daerah. Laporan keuangan memiliki peran memberikan informasi penting bagi posisi keuangan dalam hasil kerja yang dilakukan. Firdaus Dkk (2015) Laporan keuangan pemerintah daerah menggambarkan keluaran atau hasil kegiatan yang akan dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur sehingga dapat menjelaskan kinerja dan tanggung jawab pengelola keuangan.

Ikyarti dan Aprilia (2019) menyatakan laporan keuangan dikatakan berkualitas apabila dapat memberikan informasi yang mudah dipahami, bermanfaat, bebas dari kesalahan yang material, serta bisa diandalkan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan merupakan ukuran normatif yang harus diwujudkan dalam informasi akuntansi guna mencapai tujuan. Laporan keuangan yang berkualitas dapat membantu kewajiban pemerintah terutama 2 dalam pengambilan keputusan dalam hal sosial, ekonomi, dan politik (Alamsyah dkk, 2015). Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Tawaqal dan Suparno (2017) faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah

sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian intern dan kompetensi sumber daya manusia. Penelitian tersebut didukung oleh Agustina dkk (2020) menyatakan faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah antara lain pemanfaatan teknologi informasi, penerapan sistem informasi akuntansi dan kompetensi sumber daya manusia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pengaruh sistem pengendalian internal pemanfaatan teknologi informasi dan kesesuaian standar akuntansi terhadap kualitas pelaporan keuangan pada RSUD Mgr.Gabriel Atambua.

1.3 Persoalan Penelitian

Berdasarkan masalah penelitian diatas maka persoalan yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan pada RSUD Mgr.Gabriel Manek SVD Atambua ?
2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan pada RSUD Mgr.Gabriel Manek SVD Atambua?
3. Apakah kesesuaian standar akuntansi berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan pada RSUD Mgr.Gabriel Manek SVD Atambua?

1.4 Tujuan dan kemanfaatan Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang dikemukakan diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas pelaporan keuangan pada RSUD Mgr Gabriel Manek SVD Atambua
2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas pelaporan keuangan pada RSUD Mgr. Gabriel Manek SVD Atambua
3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh kesesuaian standar akuntansi terhadap kualitas pelaporan keuangan RSUD Mgr. Gabriel Manek SVD Atambua.

1.4.2 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademik

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dalam menambah wawasan keilmuan dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada jurusan akuntansi dan sebagai bahan acuan bagi peneliti selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan yang positif bagi instansi baik dari segi peningkatan sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dan standart akuntansi dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan.